
Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu Isu Strategis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026

¹Yohanis Rerung Sau

Email Koresponden: yohanisrerungsau@gmail.com

Dikirim: 2 Januari 2021

| Diterima: 3 Februari 2021

| Dipublikasikan: 28 Februari 2021

Abstrak

Prioritisasi isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Prioritisasi isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot. Setiap isu strategis diberi nilai berdasarkan setiap kriteria dan akhirnya diperoleh nilai total masing-masing isu strategis. Selanjutnya berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepan adalah "Tertinggalnya Kualitas Hidup Manusia". Dari masalah pokok tersebut diatas terdapat lima masalah yang dianggap penyebabnya. Enam masalah tersebut adalah: (1) Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar; (2) Belum Terpenuhinya Standar Minimal Pelayanan Dasar; (3) Rendahnya Produktivitas Perekonomian Masyarakat; (4) Rendahnya Daya Tarik dan Daya Saing Wilayah; (5) Belum Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia maka Masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepan adalah "Tertinggalnya Kualitas Hidup Manusia". Dan berdasarkan penilaian isu strategis yang terbobot maka yang menjadi prioritas pertama adalah transformasi pelayanan publik dengan bobot 88,45. Rekomendasi/Saran Dalam rangka penyelesaian masalah pokok di kabupaten Toraja Utara sesuai periode RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 maka perlu: Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran perkapita, rata-rata lama sekolah Angka Harapan Hidup dan perlu dilakukan koordinasi kepada semua perangkat daerah untuk menentukan program program kegiatan yang terukur dan Pritotas utama yang akan didorong selama lima tahun ke depan adalah transformasi pelayanan public permasalahan isu-isu strategis

Kata Kunci

¹Yohanis Rerung Sau adalah Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Email: yohanisrerungsau@gmail.com

KAJIAN PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 - 2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 27 bahwa Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Selanjutnya pasal 7 menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: a) teknokratik; b) partisipatif; c) politis; dan d) atas-bawah dan bawah-atas. Pada pasal 8 disebutkan juga bahwa Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Sesuai pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 lebih lanjut disebutkan bahwa Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Dokumen teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, sesuai ketentuan yang berlaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai bahan masukan utama perencanaan RPJMD bagi Pemerintahan dalam periode 2021 - 2026. Rancangan Teknokratik ini akan diintegrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Permasalahan pembangunan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Sementara Permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah

Isu strategis Daerah dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah. Isu strategis Daerah, dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah. Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi Untuk perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis provinsi perlu mendapat pendampingan dari pusat dan mengakomodir masukan dari kabupaten/kota di dalamnya. Untuk tingkat kabupaten/kota perlu mendapat pendampingan dari pusat dan provinsi dalam perumusannya. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap awal keterlibatan langsung perwakilan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana

dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, sesuai ketentuan yang berlaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai bahan masukan utama perencanaan RPJMD bagi Pemerintahan dalam periode 2021 - 2026. Rancangan Teknokratik ini akan diintegrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara yang terpilih hasil pemelihan kepala daerah tahun 2020.

RPJMD ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2021 - 2026 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030, hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2021 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan tahun 2021 - 2026.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan arahan dari dokumen RPJPD ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari suatu periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 -2030 bahwa RPJPD tahun 2010 -2030 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut maka perlu menyusun perumusan permasalahan dan isu-isu strategis sebagai masukan dalam rangka penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021 – 2026

1.2 Tujuan

Tujuan perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Toraja Utara adalah:

1. Menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
2. untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya
3. merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

II. Metodologi Penentuan Kriteria dan bobot kriteria dalam prioritisasi isu-isu strategis Isu

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat makro baik ekonomi, politik, maupun sosial. Perspektif Kabupaten Toraja Utara untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Prioritisasi isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Prioritisasi isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot. Setiap isu strategis diberi nilai berdasarkan setiap kriteria dan akhirnya diperoleh nilai total masing-masing isu strategis. Kriteria yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

1.1 Kriteria dan bobot kriteria dalam prioritisasi isu-isu strategis

Tabel 1 Kriteria Bobot

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat besar	25
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5.	Mendesak untuk ditangani	15
	Total	100

Sumber : Tabel T-B.38. permendagri 86 tahun 2016

Pembobotan dilakukan setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

III. PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian Provinsi dan target Indikator Umum pada RPJMD periode 2021-2026. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap.

Selain itu dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah harus merujuk pada permasalahan pembangunan, dimana permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks. Dengan kebijakan yang tepat maka dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan secara efektif dan efisien.

Hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan dimasa lalu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembangunan di masa lalu sudah menyelesaikan permasalahan pembangunan. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2 Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toraja Utara 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia						
		Toraja Utara	66,70	67,49	67,90	68,49	69,23
	Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	72,66	71,93
2	Angka Harapan Hidup						
		Toraja Utara	72,80	72,87	72,94	73,09	73,35
	Sulawesi Selatan				70,03	70,43	70,59
3	Rata Rata Lama Sekolah						
		Toraja Utara	7,71	7,72	7,73	7,76	7,92
	Sulawesi Selatan	7,64	7,75	7,95	8,02	8,26	8,36
4	Pegeluaran Perkapita (ribu rupiah)						
		Toraja Utara	7.033,00	7.228,00	7.457,00	7.783,00	8.083,00
	Sulawesi Selatan	9.723,00	10.281,00	10.459,00	10.814,00	11.118,00	11.118,00*

Sumber: BPS Sulawesi Selatan tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam tiga tahun terakhir yang masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. IPM Toraja Utara pada 2020 sebesar 69,33, sementara rata-rata Provinsi sebesar 71,93. Ketertinggalan ini tidak berubah dibanding tahun 2015, dimana IPM Toraja Utara sebesar 66,70 sementara IPM Provinsi 69,15. Diantara komponen IPM, Toraja Utara paling tertinggal pada aspek ekonomi dengan indikator

pengeluaran perkapita disesuaikan. Pada tahun 2015, pengeluaran perkapita Toraja Utara sebesar Rp.7.033.00, jauh lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang sebesar Rp. 9.723.00. Pada tahun 2020, meskipun tercapai kenaikan menjadi Rp.8.083.00, tetapi tetap lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi yang juga meningkat menjadi Rp.11.118.00. Pada indikator rata-rata lama sekolah, Toraja Utara juga tertinggal dari rata-rata Provinsi yakni 8,36 tahun berbanding 7,96 tahun pada 2020. Walaupun pada bidang kesehatan Toraja Utara melampaui rata-rata Provinsi yakni Angka Harapan Hidup sebesar 73,35 tahun sementara rata-rata Provinsi sebesar 70,43 tahun.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepan adalah “Tertinggalnya Kualitas Hidup Manusia”. Dari masalah pokok tersebut diatas terdapat lima masalah yang dianggap penyebabnya. Enam masalah tersebut adalah: (1) Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar; (2) Belum Terpenuhinya Standar Minimal Pelayanan Dasar; (3) Rendahnya Produktivitas Perekonomian Masyarakat; (4) Rendahnya Daya Tarik dan Daya Saing Wilayah; (5) Belum Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik.



Gambar 1 Masalah Pokok dalam Pembangunan Kabupaten Toraja Utara

1. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Secara umum, ketersediaan infrastruktur dasar di daerah ini masih jauh dari memadai. Terdapat indikasi yang menunjukkan masih adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai. Selain itu persentase rumah tangga yang menikmati air bersih yang layak dan juga energi listrik, juga tampak relatif rendah.

Sarana perkotaan seperti drainase dan pembuangan sampah, menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya memuaskan. Sedangkan sarana pedesaan seperti jaringan irigasi dan jalan desa, juga tampak memerlukan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas.

Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian, menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi menekan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3 Rumusan Permasalahan Masih Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Permasalahan	Akar Masalah	
Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Masih banyaknya ruas jalan yang berada pada kondisi rusak
	2	Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air.
	3	Rencana Detail Tata Ruang belum semuanya disusun berdasarkan RTRW
	4	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi layak dan belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat
	6	Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum
	7	Masyarakat belum memahami tentang pentingnya mengkomsumsi air bersih
	8	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah

2. Belum Terpenuhinya Standar Minimal Pelayanan Dasar

Pembangunan pendidikan selama masih diperhadapkan pada sejumlah permasalahan. Seperti penempatan guru yang tidak merata lebih berkumpul di wilayah perkotaan, terbatasnya sarana prasarana pendidikan, jarak rata-rata SMA dan SMK yang masih panjang (8 Km) serta belum optimalnya proses belajar mengajar dan tata kelola pendidikan. Permasalahan ini telah memberi dampak berupa rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi murni (APM) terutama padajenjang pendidikan sekolah menengah.

Tabel 4 Rumusan Permasalahan Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan

Permasalahan	Akar Masalah	
Masih rendahnya kualitas pelayanan di bidang pendidikan	1	Tidak meratanya sebaran guru serta kurangnya tenaga pendidik dan tenaga administrasi di tiap tingkatan satuan pendidikan
	2	Penempatan tenaga pendidik belum merata dan sesuai dengan komptensinya

	3	Belum adanya TK Pembina di Kabupaten Toraja Utara karena tidak adanya ketersediaan tanah
	4	Sarana dan prasarana perpustakaan di tingkat SD belum memadai/masih kurang
	5	Kurangnya sarana prasarana SMP

3. Rendahnya Produktivitas Perekonomian Masyarakat

Kemiskinan masih merupakan masalah dan isu strategis bagi Kabupaten Toraja Utara hingga saat ini. Meskipun sejumlah indikator kinerja umum pemerintah daerah mengalami peningkatan seperti PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Angka Harapan Hidup, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan berlangsung relatif lambat sehingga Kabupaten Toraja Utara masih berada pada posisi 3 (tiga) di Sulawesi- Selatan termiskin, hal ini memerlukan penanganan yang serius dan sungguh-sungguh dalam lima tahun kedepan. Penanganan kemiskinan selama ini belum berjalan optimal karena terkendala oleh beberapa faktor seperti belum tersedianya data base kemiskinan, belum adanya pemetaan penduduk miskin, belum disusunnya roap-map penanggulangan kemiskinan, belum dikonstruksinya penanganan kemiskinan yang bersifat komprehensif, belum terbangunnya komitmen diantara stakeholder mengenai pentingnya memerangi kemiskinan dan sebagainya

Pembangunan kesehatan selama ini menghadapi sejumlah masalah seperti masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditandai dengan: Tingginya kasus gizi buruk bayi/balita; Tingginya angka kematian ibu dan anak; Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti DBD, Diare, TBC dan HIV AID; dan Masih terbatasnya ketersediaan tenaga Medis, terutama di daerah terpencil. Berbagai permasalahan tersebut diatas telah menyebabkan berbagai indikator di sektor kesehatan belum menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan.

Tabel 5 Rumusan Permasalahan Masih Rendahnya Derajat Kesehatan

Permasalahan		Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas pelayanan di bidang kesehatan	1	Tingginya Kasus Gizi Buruk (17 Anak) yang menjadikan Toraja Utara masuk dalam kabupaten kriteria Buruk yang berada pada posisi ke 3 terbanyak kasusnya di provinsi
	2	Adanya kasus HIV –AIDS yang ditemukan terutama pada ibu hamil
	3	Pembangunan Rumah Sakit Daerah belum selesai
	4	Dokter yang ada kebanyakan dokter PTT
	5	Kurangnya minat tenaga paramedis untuk ditempatkan didaerah terpencil
	6	Banyaknya kasus penderita DBD pada musun hujan
	7	Tingginya kasus gigitan hewan penyebab rabies
	8	Tingginya pengguna narkoba

	9	Belum semua lembang dan kelurahan memiliki poskesdes
	10	Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil
	11	sistim survailans yang kurang berjalan baik untuk mendeteksi mereka yang rentang gizi buruk

4. Rendahnya daya Tarik dan Daya Saing Wilayah

Salah satu indikasi penting rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah adalah rendahnya nilai penanaman modal serta terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Toraja Utara.

Belum teridentifikasi secara akurat potensi dan peluang investasi daerah, belum ditetapkannya kawasan strategis sesuai dengan potensi wilayah, masih minimnya kemitraan dengan lembaga keuangan, swasta, dan lembaga donor dalam pembiayaan pembangunan daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan ruang berbasis RTRW.

Tabel 6 Rumusan Permasalahan Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin

Permasalahan	Akar Masalah	
Rendahnya Produktivitas Perekonomian Masyarakat	1	Prosentase penduduk miskin masih tinggi dengan asset sosial-ekonomi yang terbatas
	2	Rendahnya produktivitas dan daya saing sektor pertanian
	3	Rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi serta UMKM bidang industri, perdagangan dan jasa
	4	Rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja
	5	Tingginya pengangguran terbuka dan semi pengangguran

5. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tabel 7 Rumusan Permasalahan Masih Rendahnya Daya Tarik dan Daya Saing Wilayah

Permasalahan	Akar Masalah	
Masih rendahnya daya tarik dan daya saing wilayah	1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
	2	Belum optimalnya peranan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	3	Banyaknya masalah – masalah yang timbul dalam masyarakat Lembang yang berhubungan dengan Adat
	4	Belum optimalnya pengelolaan situs sejarah dan benda kepurbakalaan
	5	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata yang baru

Tabel 8 Rumusan Permasalahan Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Permasalahan	Akar Masalah	
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Nilai SAKIP belum maksimal yaitu nilai CC
	2	Indeks kepuasan masyarakat belum maksimal
	3	Penegakan Perda belum maksimal

3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Layanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
 - Belum terpenuhinya standar minimal pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - Belum terpenuhinya standar minimal pendidikan dasar
 - Belum terpenuhinya standar minimal pendidikan kesetaraan
 - Belum diterapkannya pendidikan dengan kurikulum muatan lokal
 - Belum terpenuhinya kuantitas, kualitas dan persebaran tenaga pendidik dan kependidikan
 - Belum tersedianya sarana ITI
2. Urusan Kesehatan
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan ibu hamil
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan ibu melahirkan
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan bayi baru lahir
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan warga usia sekolah, usia produktif dan usia lanjut;
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan penyakit menular dan tidak menular
 - Belum terpenuhinya 7 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Belum terpenuhinya standar minimal pemenuhan fasilitas air minum sehari-hari
 - Kualitas jalan dominan sudah rusak
 - Kualitas SDM jasa kontruksi yang rendah;
 - Ketidapatuhan terhadap regulasi penataan ruang yang disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan informasi penataan ruang (RTRW, RDTR dan peraturan yang lebih rinci);
 - Kondisi Infrastruktur sumber daya air belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi saluran irigasi dan tampungan air yang kurang memadai
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - Masih adanya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini

disebabkan oleh faktor drainase yang buruk, sanitasi yang kurang memadai, dan jalan lingkungan yang tidak layak serta kurang terpenuhinya kebutuhan listrik

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Belum terpenuhinya standar minimal layanan ketertiban dan ketenteraman
 - Belum tersedianya sistem informasi bencana yang akurat dan terbaru
 - Banyaknya pelanggaran perda dalam bentuk bangunan dan penambangan liar, PMKS dan PKL yang tidak teratur;
 - Masih rendahnya pelayanan penanganan bencana dikarenakan jangkauan terlalu luas, belum adanya pos pembantu serta kurangnya armada.
 - Belum ditetapkannya wilayah manajemen kebakaran
 - Kurangnya kualitas SDM aparaturnya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
 - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
 - Kurangnya pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah
6. Urusan Sosial
 - Belum terpenuhinya standar minimal pelayanan sosial mencakup rehabilitasi dan perlindungan sosial
 - Belum optimalnya penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS disebabkan kurangnya akuratnya data PMKS dan kemiskinan;
 - Rendahnya pemahaman PSKS dalam menangani PMKS serta rendahnya daya dukung sarpras;
 - Tidak semua keluarga miskin (BDT) menerima bantuan RASTRA
 - Tidak terpeliharanya taman makam pahlawan
 - Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM
 - Kurangnya sarana dan prasarana sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
 - Rendahnya kompetensi penduduk usia kerja dalam berwirausaha atau menjadi tenaga kerja
 - Rendahnya produktivitas tenaga kerja
 - Kurang lengkapnya ketersediaan informasi pasar kerja
 - Adanya perselisihan dalam hubungan industrial pekerja dan perusahaan
 - Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Belum terlembagakannya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah

- Belum tepenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak hak perempuan dan anak
 - Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, birokrasi dan perekonomian
 - Belum optimalnya fungsi sistem layanan perlindungan perempuan dan anak
2. Urusan Pangan
 - Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap keberagaman pangan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan dan gizi bagi keluarga.
 - Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
 - Belum ada kemandirian pangan
 3. Urusan Pertanahan
 - Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BPN dalam hal penyelesaian sengketa tanah
 - Belum optimalnya layanan kepada masyarakat dalam pengurusan akta tanah
 - Belum ada Aspek legalitas tanah adat
 4. Urusan Lingkungan Hidup
 - Belum optimalnya implementasi RPPLH dan KLHS
 - Belum optimalnya pemeliharaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau
 - Belum optimalnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun yang ditimbulkan oleh aktivitas pelaku usaha
 - Belum optimalnya penyuluhan lingkungan hidup dan pelibatan pengetahuan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - Belum efektifnya pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir
 - Belum tersedianya laboratorium pemeriksaan kualitas air dan udara
 - Belum tersedianya tenaga khusus yang menangani penegakan dan pelanggaran lingkungan
 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil
 - Belum akuratnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Lembang
 - Masih perlunya pembinaan terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik
 - Belum signifikannya penataan desa adat dan masyarakat hukum adat

- Belum berkembangnya kerjasama antar desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya desa
 - Basis data dalam perumusan RPJMDes dan RKPDes belum sepenuhnya akurat dan terbaru
 - Belum terwujudnya desa mandiri
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Belum efektifnya fungsi lembaga dan kemitraan dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - Belum optimalnya pelaksanaan KIE dan pelibatan mitra kerja dalam gerakan KB.
 - Kurangnya tenaga penyuluh KB
8. Urusan Perhubungan
- Rendahnya disiplin pengguna jalan
 - Belum terpenuhinya standarisasi keselamatan transportasi
 - Belum optimalnya pelayanan angkutan lalu lintas dan jalan raya
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
- Belum terlaksanannya implementasi interoperabilitase government dan terjangkaunya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi
 - Belum optimalnya tata kelola Komisi Informasi Daerah
 - Jaringan Telekomunikasi belum mencapai seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara
 - Kurang pemanfaatan pemanfaatan website Kabupaten sebagai portal resmi
 - Kurangnya jumlah tenaga ahli pengelola website
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Lemahnya kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - Rendahnya kemampuan, kompetensi dan kapasitas SDM pengelola koperasi dan UMKM
 - Terbatasnya kapasitas modal, akses pemasaran, serta inovasi dan kualitas produk koperasi dan usaha mikro
 - Kurangnya akses pelaku usaha kepada lembaga keuangan
 - Kurangnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektualm (HAKI)
11. Urusan Penanaman Modal
- Belum tersedianya regulasi PM terupdate
 - Belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi
 - Kurangnya promosi penanaman modal
 - Belum tersedianya data jumlah bangunan yang memiliki dan tidak memiliki IMB
 - Kurang teintegrasinya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

- penanaman modal.
- Kuantitas dan kualitas pelayanan public
- Sarana dan Prasarana belum memadai
- Belum tersedianya mall pelayanan public
- 12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - Terbatasnya organisasi olah raga dan prestasi cabang olah raga
 - Terbatasnya kapasitas wirausaha muda, pemoda pelopor dan pemuda kader
 - Terbatasnya kapasitas SDM, organisasi dan fasilitas kepramukaan
 - Kurangnya gelanggang olahraga terbuka dan tertutup
 - Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
- 13. Urusan Statistik
 - Belum terkumpulnya data statistic sektoral secara lengkap, akurat dan terbarukan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 14. Urusan Persandian
 - Belum terjaminnya keamanan informasi krusial daerah melalui sistem persandian
 - Belum berjalannya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
 - Lemahnya fungsi bidang persandian untuk penerapan aplikasi informasi
- 15. Urusan Kebudayaan
 - Pengembangan kebudayaan daerah kurang optimal, yang disebabkan oleh peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan budaya
 - Belum optimalnya pengembangan kesenian daerah sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan
 - Belum tergalinya sejarah lokal/daerah untuk diwariskan kepada generasi muda
 - Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah
- 16. Urusan Perpustakaan
 - Belum optimalnya fungsi perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah disebabkan terbatasnya bahan bacaan dan tenaga pustakawan
 - Rendahnya budaya membaca masyarakat dalam mendukung inklusi sosial
 - Belum optimalnya koleksi naskah kuno serta koleksi budaya etnis Toraja
 - Belum tersedianya taman bacaan di setiap kecamatan
 - Belum terlaksananya literasi dan tranformasi perpustakaan
- 17. Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya tata kelola arsip daerah, hal ini disebabkan karena masih minimnya fasilitas dan SDM pengelola arsip
- Jaringan informasi kearsipan belum optimal berjalan secara antar daerah serta antara daerah dengan nasional.
- Belum tersedianya tenaga arsiparis

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- Belum efektifnya restocking bibit ikan di sungai dalam menambah populasi ikan untuk dimanfaatkan masyarakat
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumber daya ikan dip perairan umum dan genangan air lainnya
- Masih kurang sarana dan prasarana budidaya ikan
- Masih kurangnya kuantitas kualitas SDM BBI
- Kurang intensifnya budidaya ikan berbasis mina padi diterapkan oleh petani/pembudidaya ikan.

2. Pariwisata

- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata secara berkelanjutan;
- Kurang tersedianya data dan visualisasi daya tarik wisata untuk promosi potensi wisata secara berkelanjutan
- Belum berkembangnya ruang/zona kreatif sebagai ruang berekespresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif dalam menunjang pariwisata

3. Pertanian

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana pendukung pertanian untuk peningkatan produksi berbasis komoditas dan teknologi spesifik lokasi
- Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) belum terkelola dengan sinkron
- Kurangnya regenerasi petani perkebunan khususnya kopi dalam mendukung kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan secara berkelanjutan dan resilien dengan perubahan iklim
- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi ternak dan kesehatan hewan
- Tidak terpenuhinya rasio yang cukup antara penyuluh pertanian dengan jumlah kelompok tani/desa potensi pertanian.

4. Perdagangan

- Belum optimalnya sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan

pendaftaran pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, pergudangan, waralaba dan pengawasan bahan berbahaya

- Belum efektifnya penyediaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- Belum efektifnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama pada hari raya

5. Perindustrian

- Belum efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri dengan dukungan sumberdaya, sarana dan prasarana, dan peran serta masyarakat yang memadai;
- Masih terbatasnya pelatihan bagi pelaku industry kecil dan menengah
- Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi ITI dalam pemasaran produk

D. Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

- Terbatasnya ketersediaan data level kecamatan dan data terpilah gender dalam analisis kondisi umum, permasalahan dan isu strategis daerah
- Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan dalam menyampaikan fakta dan realitas terkait isu strategis tertentu dalam forum SKPD dan musrenbang
- Belum efektifnya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta evaluasi berbasis data kinerja yang akurat
- Belum berkembangnya kerjasama daerah
- Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam perumusan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD terutama dalam hal cascading pohon kinerja.

2. Keuangan

- Belum akurat dan efektifnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, pengelolaan perbendaharaan daerah, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah
- Belum efektifnya pengelolaan barang milik daerah dalam penatausahaan, inventarisasi, dan pengamanannya
- Belum efektifnya pengelolaan pendapatan daerah

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kepegawaian dalam menunjang berbagai aspek pengelolaan pegawai
 - Terbatasnya porsi pegawai yang telah menamatkan diklat untuk berbagai jenis kompetensi baik structural maupun fungsional
4. Penelitian dan Pengembangan
- Terbatasnya output kelitbang yang dihasilkan
 - Belum berkembangnya orientasi yang menempatkan hasil litbang sebagai dasar dalam formulasi kebijakan ataupun perumusan program
5. Pengawasan
- Terbatasnya jumlah APIP dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu,
 - Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dalam asistensi pelaporan akuntabilitas kinerja
6. Sekretariat Dewan
- Terbatasnya kapasitas SDM, sarana/prasarana dan fasilitas dalam menyelenggarakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
7. Sekretariat Daerah
- Belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi kebijakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi dan koordinasi produk hukum
 - Belum efektifnya koordinasi kebijakan perekonomian, kebijakan sumberdaya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa
 - Belum optimalnya koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah
8. Kecamatan
- Status Desa/Lembang yang belum signifikan mencapai kualifikasi mandiri sehingga merupakan tantangan bagi pembinaan oleh pemerintah kecamatan
 - Koordinasi penanganan ketertiban dan ketenteraman, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana/prasarana belum optimal disebabkan keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pemerintahan kecamatan
 - Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan umum disebabkan oleh keterbatasan SDM dan fasilitas dalam menjangkau penerima layanan

- Belum optimalnya koordinasi, data dan pelaporan ke tingkat Kabupaten (Sekretariat Daerah)

3.3 Isu Isu Staregis

3.3.1 Identifikasi Isu Strategis Global

A. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemik Covid-19 yang berawal di Wuhan (China) lalu menyebar ke seluruh dunia akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan global dalam lima tahun ke depan. Di Indonesia, pandemic yang berlangsung sejak Maret 2020 telah menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius berupa jumlah penduduk terkapar yang meningkat secara eksponensial diikuti jumlah kematian yang terus bertambah. Dampaknya tidak hanya pada aspek kesehatan, melainkan meluas ke aspek ekonomi berupa berhenti/melambatnya kegiatan produksi sejumlah pabrik, terganggunya rantai pasok komoditas, terganggunya pergerakan orang, yang pada gilirannya menyebabkan stagnasi perekonomian. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dan ini juga berlangsung di daerah termasuk Kabupaten Toraja Utara. Dalam lima tahun ke depan, dampak pandemic Covid-19 masih akan berpengaruh signifikan dalam pembangunan daerah Kabupaten Toraja Utara, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan berbagai aspek lainnya.

Dampak lanjutan dari pandemic Covid-19 adalah kecenderungan stagnasi proses globalisasi atau deglobalisasi. Tidak hanya masing-masing negara menahan ekspor dan impor terutama bahan pangan, tetapi juga pergerakan manusia antar negara. Kabupaten Toraja Utara terpengaruh dengan deglobalisasi tersebut pada aspek pariwisata, khususnya karena kunjungan wisatawan dari manca negara berkurang. PAD dari pariwisata terdampak dengan proses deglobalisasi karena pandemic Covid-19.

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang digerakkan PBB untuk diikuti seluruh negara di dunia. TPB 2016-2030 mencakup 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Sekretaris Jenderal PBB telah mengajukan enam kerangka elemen SDGs, kehormatan, kesejahteraan, keadilan, kerjasama, bumi dan manusia.

Di Indonesia, TPB mempengaruhi pembangunan daerah melalui pengintegrasian ke dalam RPJMD yang diatur dalam Permendagri 86/2017 serta melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Toraja Utara memiliki relevansi tinggi dengan TPB khususnya terkait dengan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, relasi gender dan sebagainya.

C. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dalam bentuk pemanasan global serta ketidakaturan musim karena La Nina dan El Nino sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Toraja Utara yang berbasis pada pertanian. Kopi yang merupakan komoditas andalan rakyat serta melibatkan berbagai perusahaan dalam pengembangannya, terdampak langsung atas perubahan iklim tersebut dalam bentuk terganggunya produktivitas kopi. Ini akan berdampak pada mata pencaharian sebagian besar petani. Perubahan iklim juga berdampak terhadap bencana alam seperti longsor dan kekeringan.

3.3.2 Identifikasi Isu Strategis Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan arahan nasional yang harus diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia demi terwujudnya konsistensi pembangunan antara pusat dan daerah. Dalam RPJMN terdapat tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas yakni:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Mengembangkan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.3.3 Identifikasi Isu Strategis Provinsi

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan memuat beberapa kebijakan/program nyata Gubernur yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah yakni:

- 1) Pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur jalan dalam mendukung pariwisata;
- 2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 3) Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi;
- 4) Hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
- 5) Pembangunan rest-area
- 6) Pembangunan rumah sakit regional bertaraf internasional

Dari berbagai kebijakan tersebut, yang relevan sebagai isu strategis Kabupaten Toraja Utara adalah pembangunan infrastruktur jalan pendukung pariwisata, karena daerah ini memiliki potensi destinasi pariwisata. Selain itu, hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam relevan sebagai isu strategis, dengan pertimbangan bahwa Toraja Utara memiliki produk pertanian yang terhilirisasi yakni kopi.

3.3.4 Identifikasi Isu Strategis dari Masalah Pembangunan Daerah

Dari masalah pembangunan daerah yang telah teridentifikasi, yang potensial berpengaruh besar dalam pembangunan Toraja Utara lima tahun kedepan adalah:

- 1) Kualitas manusia pada aspek pendidikan
- 2) Kualitas manusia pada aspek kesehatan
- 3) Kualitas manusia pada aspek daya beli
- 4) Pemenuhan standar minimal pelayanan dasar
- 5) Infrastruktur dasar
- 6) Produktivitas sektor pertanian
- 7) Daya saing pariwisata
- 8) Tata kelola pemerintahan yang baik
- 9) Kemiskinan
- 10) Kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam

Berdasarkan identifikasi isu strategis pada level global, nasional, provinsi dan permasalahan pembangunan daerah tersebut di atas, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepan dapat dirangkai sebagai berikut.

- 1) Pandemi Covid-19
- 2) Mitigasi perubahan iklim
- 3) Penanggulangan kemiskinan
- 4) Relasi gender dan perlindungan anak
- 5) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 6) Pemenuhan SPM pendidikan
- 7) Pemenuhan SPM kesehatan
- 8) Pemenuhan SPM pekerjaan umum
- 9) Pemenuhan SPM pelayanan perumahan dan pemukiman
- 10) Pemenuhan SPM ketertiban dan ketenteraman
- 11) Pemenuhan SPM sosial
- 12) Ketahanan bencana
- 13) Daya saing pariwisata
- 14) Pembangunan infrastruktur dasar
- 15) Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
- 16) Kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
- 17) Hilirisasi produk sumberdaya alam
- 18) Penguatan pemerintahan kecamatan
- 19) Penguatan pemerintahan desa/lembang
- 20) Pertanian dan ketahanan pangan
- 21) Pengembangan koperasi dan UMKM
- 22) Transformasi pelayanan publik

3.3.5 Prioritisasi Isu Strategis

Prioritisasi isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Prioritisasi isu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria dimana setiap kriteria memiliki bobot. Setiap isu strategis diberi nilai berdasarkan setiap kriteria dan akhirnya diperoleh nilai total masing-masing isu strategis. Kriteria yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Kriteria dan bobot kriteria dalam prioritisasi isu-isu strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat besar	25
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5.	Mendesak untuk ditangani	15
		100

Berdasarkan lima kriteria tersebut, setiap isu strategis diberi penilaian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 10 Penilaian isu strategis berdasarkan isu terbobot

No.	Isu Strategis	Nilai Berdasarkan Kriteria Terbobot					Nilai Total	Ranking
		1. (20%)	2. (20%)	3. (25%)	4. (20%)	5. (15%)		
1.	Pandemik Covid-19	90 = 18,0	85 = 17,0	90 = 22,5	85 = 17,0	88 = 13,2	87,70	2.
2.	Mitigasi perubahan iklim	85 = 17,0	80 = 16,0	80 = 20,0	77 = 15,4	70 = 10,5	78,90	20.
3.	Penanggulangan kemiskinan	87 = 17,4	85 = 17,0	90 = 22,5	85 = 17,0	85 = 12,8	86,65	3.
4.	Relasi gender dan perlindungan anak	70 = 14,0	77 = 15,4	70 = 17,5	70 = 14,0	67 = 10,1	70,95	22.
5.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	95 = 19,0	70 = 14,0	75 = 18,8	70 = 14,0	85 = 12,8	78,50	21
6.	Pemenuhan SPM pendidikan	85 = 17,0	90 = 18,0	87 = 21,8	85 = 17,0	80 = 12,0	85,75	9.
7.	Pemenuhan SPM kesehatan	85 = 17,0	90 = 18,0	88 = 22,0	86 = 17,2	80 = 12,0	86,20	6.
8.	Pemenuhan SPM pekerjaan umum	85 = 17,0	90 = 18,0	87 = 22,0	84 = 16,8	79 = 11,9	85,65	10.

9.	Pemenuhan SPM pelayanan perumahan	85 = 17,0	90 = 18,0	84 = 21,0	80 = 16,0	80 = 12,0	84,00	16
10.	Pemenuhan SPM ketertiban dan ketenteraman	85 = 17,0	90 = 18,0	89 = 22,3	81 = 16,2	83 = 12,5	85,90	8.
11.	Pemenuhan SPM sosial	85 = 17,0	90 = 18,0	87 = 21,8	83 = 16,6	80 = 12,0	85,35	13.
12.	Ketahanan bencana	85 = 17,0	90 = 18,0	87 = 21,8	80 = 16,0	85 =12,8	85,50	12.
13.	Daya saing pariwisata	84 = 16,8	87 = 17,4	90 = 22,5	84 = 16,8	78 = 11,7,0	85,20	14.
14.	Pembangunan infrastruktur dasar	85 = 17,0	87 = 17,4	89 = 22,3	89 = 17,8	80 = 12,0	86,45	5.
15.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	87 = 17,4	89 = 17,8	88 = 22,0	85 = 17,0	82 =12,3	86,50	4.
16.	Kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam	86 = 17,2	87 = 17,4	87 = 21,8	80 = 16,0	79 =11,85	84,20	15
17.	Hilirisasi produk sumberdaya alam	83 = 16,6	75 = 15,0	89 = 22,3	88 = 17,6	76 =11,4	82,85	17.
18.	Penguatan pemerintahan kecamatan	70 = 14,0	79 = 15,8	89 = 22,3	83 = 16,6	77 =11,55	80,20	19.
19.	Penguatan pemerintahan desa/lembang	81 = 16,2	79 = 15,8	88 = 22,0	84 = 16,8	78 = 11,7	82,50	18.
20.	Pertanian dan ketahanan pangan	85 = 17,0	85 = 17,0	87 = 21,8	88 = 17,6	82 = 12,7	86,05	7.
21.	Pengembangan koperasi dan UMKM	82 = 16,4	88 = 17,6	86 = 21,5	88 = 17,6	83 = 12,5	85,55	11.
22.	Transformasi pelayanan publik	94 = 18,8	88 = 17,6	88 = 22,0	85 = 17,0	87 = 13,1	88,45	1.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/SARAN

a) Kesimpulan

1. Berdasarkan Indek Pembangunan Manusia maka Masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepan adalah **“Tertinggalnya Kualitas Hidup Manusia”**.

2. Berdasarkan penilaian isu strategis yang terbobot maka yang menjadi prioritas pertama adalah transformasi pelayanan publik dengan bobot 88,45.

b) Rekomendasi/Saran

Dalam rangka penyelesaian masalah pokok di kabupaten Toraja Utara sesuai periode RPJMD Kanupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 maka perlu:

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran perkapita, rata-rata lama sekolah Angka Harapan Hidup dan perlu maka perlu dilakukan koordinasi kepada semua perangkat daerah untuk menentukan program program kegiatan yang terukur
2. Prioritas utama yang akan didorong selama lima tahun ke depan adalah transformasi pelayanan publik

Referensi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeah Kabupaten Toraja Utara 2010 - 2030

Indeks Pembangunan Manusia, BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Dalam Angka, BPS Kupaten Toraja Utara